

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menjelaskan lebih spesifik mengenai variabel, landasan teori yang digunakan (*grand theory*) serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

2.1.1 Konsep Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) kemiskinan memiliki arti suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran. Ukuran kemiskinan yang digunakan adalah dengan menggunakan ukuran atau batasan garis kemiskinan (GK).

Kemiskinan memberikan merupakan kondisi serba kekurangan seperti minimnya kepemilikan modal, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya tingkat penghasilan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan minimnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan.

Menurut Todaro dan Smith (2006) kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara enam karakteristik berikut:

1. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.

2. Pendapatan perkapita negara-negara Dunia Ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
3. Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata.
4. Mayoritas penduduk di negara-negara Dunia Ketiga harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara Dunia Ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di negara maju.
6. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai. Selain itu tingkat kegagalan penyelesaian pendidikan relatif tinggi, sedangkan tingkat melek huruf masih sangat rendah.

Kemudian kemiskinan dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni (Todaro, 2003):

1. Aspek kebutuhan hidup yang layak. Artinya adalah bahwasanya kemiskinan itu terjadi apabila masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yang disebabkan adanya keterbatasan kediaan barang dan pelayanan untuk dapat hidup sesuai dengan standar kelayakan. Hal tersebut digolongkan sebagai kemiskinan mutlak yakni tidak terpenuhinya standar kebutuhan pokok.

2. Aspek penghasilan. Artinya kemiskinan diidentifikasi sebagai kurangnya penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
3. Aspek kesempatan atau *opportunity*, adanya ketidaksamaan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan sosial seperti ketrampilan yang memadai, informasi yang berguna, jaringan sosial, dan sumber modal sehingga sehingga tidak dapat memperoleh pekerjaan dan menyebabkan kemiskinan.
4. Aspek keadaan atau kondisi. Kemiskinan dapat dilihat sebagai suatu kondisi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan yang bergizi, kekurangan sandang atau pakaian, rumah yang tidak layak huni, tingkat pendidikan yang rendah, dan minimnya kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan.
5. Aspek penguasaan terhadap sumber-sumber pendapatan. Kemiskinan disebabkan oleh ketidakmerataan pembagian pendapatan.

Ragnar Nurkse 1953 dalam (Sriyana,2021) mengemukakan teori mengenai kemiskinan yang dinamakan teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*). Menurut Ragnar Nurkse teori tersebut merupakan serangkaian daya yang saling mempengaruhi, alhasil menghadirkan kondisi masalah guna terwujudnya pembangunan yang makin meningkat pada suatu negara khususnya negara berkembang. Nurkse mengemukakan bahwa adanya keterbelakangan dan ketidaksempurnaan pasar maka mengakibatkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan pendapatan

menurun sehingga tabungan dan investasi berkurang. Kurangnya investasi mengakibatkan kurangnya modal untuk menghasilkan produktivitas.

2.1.2 Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan (BPS, 2023). Adapun rumus penghitungan garis kemiskinan adalah sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Garis kemiskinan merupakan ukuran kemiskinan yang menjadi indikator dalam penentuan apakah individu masyarakat tergolong mampu artinya mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam satu bulan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dalam

satu bulan. Garis kemiskinan dapat berguna bagi instansi terkait dalam mengukur jumlah penduduk miskin yang berada di wilayahnya berdasarkan pengeluaran perkapita minimal dalam memenuhi kebutuhan pokok.

2.1.3 Pengukuran Kemiskinan

Kemiskinan dibedakan dalam dua kategori, yaitu (Tulus Tambunan, 2001):

1. Kemiskinan Absolut.

Kemiskinan yang mengacu pada suatu ukuran standar yang berlaku sama, yang tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat atau negara. Indikator dari pengukuran absolut adalah persentase dari penduduk yang makan di bawah jumlah yang dibutuhkan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa). Indonesia menandai kemiskinan absolut dengan batasan jika jumlah uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kurang dari 2.100 kalori per kapita. Sementara itu, Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai kondisi hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1 per hari.

Pengukuran kemiskinan di Indonesia yang dilakukan Badan Pusat Statistik lazimnya menggunakan tiga indeks yaitu persentase penduduk miskin (*Head Count Index-P0*), indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), dan indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*).

Pada Penelitian ini penulis akan menggunakan *HCI-P0* untuk menggambarkan tingkat kemiskinan. *Head Count Indeks (HCI-P0)*

merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK). Sumber data utama yang digunakan BPS dalam perhitungan *HCI-P0* adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Adapun rumus perhitungan *HCI-P0* adalah sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

α : 0

z : garis kemiskinan

y_i : rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q : banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : jumlah penduduk

2. Kemiskinan Relatif.

Kemiskinan relatif adalah suatu keadaan kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum dalam masyarakat tersebut, yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Orang yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin relative. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan miskin dalam pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang didalamnya mengkategorikan keluarga sebagai Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I berdasarkan aspek material dan spiritual

2.1.4 Konsep Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang (Saputra, 2011). Menurut Napitupulu (2007), sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibuat dengan tiga pendekatan dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup usia masyarakat yang panjang beserta tingkat kesehatan, taraf pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (Mahroji & Nurkhasanah, 2019).

Penelitian ini akan menggunakan metode baru untuk perhitungan IPM yang dilakukan oleh BPS. Metode baru yang digunakan BPS dalam menentukan IPM dinilai lebih baik dari metode sebelumnya. Hal tersebut berkaitan dengan penggunaan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Penggunaan indikator Angka Melek Huruf pada perhitungan indeks pendidikan dinilai sudah tidak

relevan sehingga pada metode baru perhitungan indeks pendidikan digunakanlah indikator Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah, yang diklaim bisa menggambarkan kondisi yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang bisa terjadi. Pada metode baru juga mengganti penggunaan PDB dengan PNB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Sebelum melakukan penyusunan IPM, perlu kiranya melakukan perhitungan terhadap masing-masing komposisi indeks yang digunakan dalam perhitungan IPM metode baru. Kemudian untuk menentukan masing-masing dimensi penyusun IPM diperlukan nilai maksimum dan minimum. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan standar *United Nations Development Program (UNDP)* untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Tabel 2. 1

Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Penyusun IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPS U\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP U\$)	26.572.352* (Rp)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Keterangan:

*: Daya beli minimum merupakan garid kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolaka, Papua

** : Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten/kota yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan 2025.

Kemudian setelah mengetahui nilai maksimum dan minimum masing-masing indikator penyusun IPM, maka dilakukanlah perhitungan dari dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan pengeluaran dengan menggunakan formulasi-formulasi sebagai berikut:

Dimensi Kesehatan:

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{Min}}{AHH_{Maks} - AHH_{Min}}$$

Keterangan:

$I_{Kesehatan}$: Indeks Kesehatan

AHH : Angka Harapan Hidup saat lahir (Sensus penduduk tahun 2010-SP 2010, Proyeksi Penduduk)

AHH_{Min} : Nilai Minimum Angka Harapan Hidup

AHH_{Maks} : Nilai Maksimum Angka Harapan Hidup

Dimensi Pendidikan:

$$I_{HLS} = \frac{HLS + HLS_{Min}}{HLS_{Maks} - HLS_{Min}}$$

Keterangan:

I_{HLS} : Indeks Harapan Lama Sekolah

HLS : Harapan Lama Sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional)

HLS_{Min} : Nilai Minimum Harapan Lama Sekolah

HLS_{Maks} : Nilai Maksimum Harapan Lama Sekolah

$$I_{RLS} = \frac{RLS + RLS_{Min}}{RLS_{Maks} - RLS_{Min}}$$

Keterangan:

I_{RLS} : Indeks Rata-rata Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional)

RLS_{Min} : Nilai Minimum Rata-rata Lama Sekolah

RLS_{Maks} : Nilai Maksimum Rata-rata Lama Sekolah

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan:

$I_{Pendidikan}$: Indeks Pendidikan

I_{HLS} : Indeks Harapan Lama Sekolah

I_{RLS} : Indeks Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi Pengeluaran:

$$I_{Pendapatan} = \frac{\ln(pendapatan) - \ln(pendapatan_{Min})}{\ln(pendapatan_{Maks}) - \ln(pendapatan_{Min})}$$

Keterangan:

$I_{Pendapatan}$: Indeks Pendapatan

$\ln(pendapatan)$: PNB perkapita tidak tersedia pada tingkat provinsi, sehingga diproksi dengan pengeluaran perkapita disesuaikan menggunakan data Susenas.

$\ln(pendapatan_{Min})$: Indeks pendapatan Minimum

$\ln(pendapatan_{Maks})$: Indeks pendapatan Maksimal

Pengeluaran per kapita disesuaikan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli.

Indeks pembangunan manusia dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mencapai pembangunan SDM yang baik, ketiga dimensi harus memiliki perhatian yang sama besar karena dinilai sama pentingnya. BPS menghitung IPM dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$$

Keterangan:

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

$I_{Kesehatan}$: Indeks Kesehatan

$I_{Pendidikan}$: Indeks Pendidikan

$I_{Pengeluaran}$: Indeks Pengeluaran

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam (Saputra, 2011), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0-100 dengan kategori sebagai berikut:

1. IPM lebih dari 80,0 dikategorikan tinggi
2. IPM antara 66,0-79,9 dikategorikan menengah atas
3. IPM antara 50,0-65,9 dikategorikan menengah bawah
4. IPM kurang dari 50,0 dikategorikan rendah

Apabila di suatu wilayah memiliki nilai IPM yang tinggi maka mengindikasikan bahwa kondisi masyarakat dalam proses memperoleh pendapatan, mengakses hasil pembangunan, kesehatan, pendidikan serta berbagai aspek dasar dalam kehidupan lainnya dinilai lebih baik dari pada wilayah yang memiliki IPM yang rendah.

2.1.5 Konsep Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Teori Keynes pengangguran timbul disebabkan oleh adanya permintaan agregat yang rendah. Permintaan agregat merupakan seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian. Ketika penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan maka upah akan turun dan penurunan upah tersebut akan mengakibatkan kerugian bukan menguntungkan karena penurunan upah tersebut menggambarkan daya beli masyarakat terhadap suatu barang. Daya beli masyarakat yang merupakan salah satu indikator dalam IPM yang rendah akan mengakibatkan perusahaan menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja hampir tidak pernah seimbang dan pengangguran sering terjadi (Sukirno, 2006).

Pengangguran adalah orang-orang yang tergolong angkatan kerja dan yang secara aktif mencari pekerjaan dengan tingkat gaji tertentu tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran terdiri dari pengangguran friksional yaitu orang yang memilih menganggur karena keinginan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang disebabkan karena pencari pekerjaan tidak memenuhi syarat yang diperlukan dan pengangguran Siklis yaitu pengangguran yang di sebabkan oleh perubahan tingkat kegiatan ekonomi (Mahihody dan Engka, 2018).

Indikator pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) hal ini dikarenakan indikator utama yang sering dipakai pemerintah untuk mengukur keberhasilan kinerjanya pada bidang tenaga kerja secara khusus pengangguran melalui tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT dihitung berdasarkan perbandingan total yang tidak bekerja terhadap total angkatan kerja. Berikut merupakan formulasi perhitungan tingkat pengangguran terbuka yang dilakukan oleh BPS:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Keterangan:

TPT : Tingkat pengangguran terbuka

Jumlah Pengangguran : Angkatan kerja yang tidak bekerja

Angkatan Kerja : pekerja dan pengangguran

Apabila Nilai TPT tinggi maka dapat terindikasi bahwa di wilayah tersebut terdapat banyak masyarakat yang menganggur atau tidak bekerja padahal termasuk dalam angkatan kerja. Hal tersebut berkemungkinan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemiskinan.

2.1.6 Konsep Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah minimum provinsi (UMP) merupakan suatu acuan terhadap upah minimum yang diterima pegawai atau tenaga kerja di sebuah badan

usaha atau perusahaan yang mencakup daerah tingkat kabupaten atau kota dan penetapannya dilakukan oleh kepala provinsi atau gubernur meski pembahasannya diusulkan oleh walikota atau bupati dengan UMP sebagai acuan. Upah minimum terdiri dari upah pokok bulanan termasuk tunjangan tetap, seperti uang makan, transportasi, tunjangan kesehatan, asuransi, dan lain-lain. Untuk lebih memperjelas proses penetapan UMP, berikut merupakan tahapan dalam menetapkan UMP:

1. Dewan Pengupahan Provinsi membentuk tim survei yang terdiri dari anggota dewan pengupahan, ahli dari perguruan tinggi, dan Badan Pusat Statistik setempat.
2. Melakukan survei terkait komponen kebutuhan hidup buruh.
3. Melakukan survei sebulan sekali dari bulan Januari hingga September, sementara pada bulan Oktober sampai Desember prediksi digunakan dengan metode *least square* untuk mendapatkan nilai kebutuhan hidup layak.
4. Dewan Pengupahan Provinsi mempertimbangkan UMP berdasarkan hasil survei dan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, serta usaha marginal.
5. Upah Minimum ditetapkan pada tanggal 1 November setiap tahunnya.

Menurut Djojohadikusumo 1993 dalam (Ihsan & Ikhsan, 2018) upah minimum provinsi (UMP) dapat ditinjau dari tiga sisi, yakni dari sisi pekerja, perusahaan dan pemerintah. Dari sisi pekerja, upah menjadi kewajiban untuk membiayai kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya. Upah juga menjadi motivasi untuk para pekerja dalam produktivitas

pekerjaan mereka. Dari sisi perusahaan, upah menjadi pengurang atas keuntungan yang diperoleh, karena upah merupakan faktor biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi. Dan dari sisi pemerintah, upah menjadi sarana untuk menciptakan pendapatan yang merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian upah minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. 7 Tahun 2013 tentang upah minimum adalah, upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah ini wajib dijadikan acuan oleh pengusaha dan pelaku industri sebagai standar minimum dalam memberi upah pekerjanya.

Bagi karyawan atau pegawai yang tidak mendapat upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka mereka dapat mengajukan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 2004:

1. Karyawan dapat mengajukan perundingan bipartit antara perwakilan karyawan dan pemilik perusahaan guna mendapatkan hasil terbaik bagi kedua belah pihak.
2. Setelah melewati tenggat waktu 30 hari, jika belum ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak maka dilakukan perundingan tripartit, yaitu perundingan yang dilakukan antara perwakilan karyawan, pemilik perusahaan dan dinas ketenagakerjaan.

3. Jika setelah dilakukan perundingan tripartit belum ditemui kesepakatan, maka jalur pengadilan akan ditempuh. Salah satu pihak dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan hubungan industrial dan jalur hukum formal jika ditempuh melalui sidang di pengadilan.

Untuk menentukan besaran upah minimum, terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan seperti upah minimum tahun berjalan, inflasi yang dihitung dari bulan September tahun sebelumnya dan PDB pada periode kuartal tiga dan empat tahun sebelumnya dan kuartal satu dan dua tahun berjalan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, berikut merupakan formulasi untuk menghitung besaran upah minimum provinsi:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (Inflasi_t + \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

UM_n : Upah minimum yang akan ditetapkan

UM_t : Upah minimum tahun berjalan

Inflasi_t: Inflasi yang dihitung dari September tahun sebelumnya hingga September tahun berjalan

ΔPDB_t: Pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan kuartal I dan II tahun berjalan

Upah minimum memiliki pengaruh terhadap rendahnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu daerah sehingga pendapatan tersebut

tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya secara tidak langsung masyarakat akan mengalami kemiskinan. Upah yang rendah dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam keterampilan dan kualitas sumber daya manusia pada provinsi-provinsi yang menjadi fokus penelitian.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis menggunakan referensi rujukan jurnal ataupun artikel ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Penulis mencantumkan ringkasan mengenai jurnal rujukan tersebut pada bagian ini secara ringkas, kemudian pada lampiran juga dalam bentuk tabel yang lebih terperinci. Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperkuat dan membandingkan hasil analisis yang dilakukan.

Tabel 2. 2

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Refesensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Yacoub (2012), “Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat”, Kalimantan Barat.	Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka dengan menggunakan data panel.	Pada penelitian ini menggunakan variabel tingkat pengangguran terbuka dan alat analisis berupa <i>EViews</i> .	Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan membentuk hubungan yang berlawanan arah (negatif), yang secara teori seharusnya searah	Jurnal Eksos Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 hal 176 – 185.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(positif).	
2.	Mahsunah (2013), "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur", Jawa Timur.	Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan.	Pada penelitian tersebut data yang digunakan merupakan data <i>time series</i> sedangkan di penelitian ini menggunakan data panel.	Variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan.	Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 1(3), 1–17.
3.	Bintang (2018), "Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah (2011-2015)", Jawa Tengah.	Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan dan data yang digunakan merupakan data panel.	Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya di satu provinsi saja yaitu Jawa Tengah.	Tingkat pengangguran memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	Media Ekonomi dan Manajemen , 33(1), 20–28. https://doi.org/10.24856/mem.v33i1.563 .
4.	Stepanie Ayu Pradipta (2020), "Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan", Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.	Menganalisis pengaruh pengangguran terbuka terhadap kemiskinan dan teknik analisis yang digunakan ialah teknik analisis regresi data panel.	Penelitian tersebut menggunakan variabel rata-rata lama sekolah, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel IPM dalam melihat pengaruh sumber daya manusia terhadap kemiskinan.	Pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan.	Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 8(3), 109–115. https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p109-115 .
5.	Zikri Azriyansyah, (2022), Analisis Pengaruh IPM, PDRB dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun	Menganalisis pengaruh antara IPM dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan dan alat analisis menggunakan <i>EViews 10</i> .	Cakupan penelitian adalah seluruh Provinsi di Indonesia (2017-2021), sedangkan penelitian ini hanya mencakup pada lima provinsi dengan tingkat	Variabel IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Sedangkan variabel pengangguran menunjukkan	Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen , 1(3), 225–238.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2017–2021, Indonesia.		kemiskinan tertinggi.	hasil yang positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan.	
6.	Laga Priseptian dan Wiwin Priana Primandhana, (2022), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan, Jawa Timur.	Menganalisis pengaruh variabel UMP, IPM, dan pengangguran terhadap kemiskinan	Data yang digunakan berjenis <i>time series</i> Metode yang digunakan dalam analisis adalah analisis regresi linier berganda dengan model <i>OLS (Ordinary Least Squares)</i> serta menggunakan uji asumsi klasik <i>BLUE (Best Linier Unbiased Estimate)</i> yang diaplikasikan pada program SPSS versi 25.	UMP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. IPM memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. dan pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.	Forum Ekonomi, 1, 45–53. https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966
7.	Khairil Ihsan dan Ikhsan, (2018), Analisis Pengaruh UMP, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.	Menganalisis pengaruh UMP dan pengangguran terhadap kemiskinan dan model analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda	Pada penelitian tersebut menggunakan variabel inflasi dan pengangguran sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel TPT	Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara jumlah pengangguran berhubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), 3(3), 408–419. Diambil dari https://jim.usk.ac.id/EK/P/Article/view/8950/0
8.	Yulia Adella Sari (2021), Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah	Menganalisis hubungan upah minimum dan TPT terhadap kemiskinan	.Variabel upah minimum yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah UMK	Upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dan tingkat	Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 10(2), 121–130.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.		sedangkan dalam penelitian ini adalah UMP.	pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.	https://doi.org/10.35906/je001.v10i2.785 .
9.	Anak Agung Eriek dan I Wayan Wenagama (2020), Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan, Provinsi Bali.	Menganalisis pengaruh antara IPM dan TPT terhadap tingkat kemiskinan.	Teknik analisis data menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program <i>EViews</i> 6, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan <i>EViews</i> 10.	IPM dan TPT secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Bali periode 2009-2013.	E-Jurnal EP Unud, 9 (2), 233-261.
10.	Sa'diyah El Adawiyah (2020), Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya.	Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.	Secara konseptual, faktor-faktor penyebab kemiskinan yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia kemudian terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai (gaji yang rendah dan waktu kerja yang banyak).	Volume 1 Nomor 1, April 2020 KHIDMAT SOSIAL, <i>Journal of Social Work and Social Service</i> .
11.	Agung Saputra & Erni Febrina Harahap (2022) Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi Terhadap	Meneliti pengangguran, IPM dan UMP terhadap kemiskinan	Objek penelitian yang digunakan adalah Provinsi di Pulau Sumatra, sedangkan dalam penelitian ini	IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran dan UMP berpengaruh positif dan	E-Jurnal Bung Hatta, 21, 3. https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFEK/article/view/21563

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kemiskinan Pada 10 Provinsi di Pulau Sumatra.		objek penelitiannya adalah lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.	signifikan terhadap kemiskinan.	
12.	Kevin Dwi Prasetyo & Z. Arifin (2022), Analisis Pengaruh TPT, UMP, Pertumbuhan Ekonomi, IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa, enam Provinsi di Pulau Jawa.	Meneliti pengaruh TPT, UMP dan IPM terhadap kemiskinan.	Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah jumlah penduduk miskin, sedangkan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan.	Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan sedangkan UMP dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 6, No. 2, Mei 2022, pp. 295-303.
13.	Ali, A., Timun, L., & Murfain, L. O. (2022), Analisis Pengaruh Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, Nilai Tukar Petani, Daya Beli dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Provinsi di Sulawesi.	Meneliti pengaruh pengangguran terbuka, UMP, dan IPM terhadap kemiskinan.	Objek penelitian yang digunakan adalah Provinsi di Pulau Sulawesi, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi.	Pengangguran terbuka, UMP, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.	Jurnal Ilmiah Multidisipli n, Vol. 1, No. 2, (2022): 93- 109.
14.	Praja, R. B., Mughtar, M., & Sihombing, P. R. (2023), Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka	Menganalisis pengaruh IPM dan TPT terhadap kemiskinan dan menggunakan data panel.	Objek penelitian dalam penelitian tersebut adalah kabupaten/ kota di Provinsi DKI Jakarta, Sedangkan dalam penelitian ini	TPT memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Sementara itu IPM pada periode t-1 memiliki pengaruh	<i>Ecoplan</i> , 6(1), 78–86. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i2.656 .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta.		objek penelitiannya adalah lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi.	secara positif dan tidak signifikan terhadap persentase penduduk miskin.	
15.	Bondoyudho, G., Laut, L. T., Septiani, Y. (2020), Determinan Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2002 – 2018, Provinsi Jawa Tengah.	Menganalisis pengaruh IPM, UMP, dan TPT terhadap tingkat kemiskinan.	Data yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan jenis data runtut waktu dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.	IPM dan UMP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan selanjutnya tidak ada pengaruh signifikan antara tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan.	<i>DINAMIC: Directory of Economic Volume 2 Nomor 1.</i>
16.	Saari, M. Y., Rahman, M. A. A., Hassan, A., & Habibullah, M. S. (2016), Estimasi Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Berbagai Kelompok Etnis di Malaysia	Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan.	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut bersifat permodelan yang menghitung tingkat kemiskinan dan membandingkan hasil sebelum dan sesudah implementasi upah minimum.	Upah minimum dapat mengurangi kemiskinan.	<i>Economic Modelling, 54, 490–502.</i> https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.01.028

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Ngubane, M. Z., Mndebele, S., & Kaseeram, I. (2023), Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan: Bukti Linear dan Non-Linear di Afrika Selatan	Meneliti pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan.	Metode yang digunakan autoregressive distributed lags (ARDL) dan model non-linear autoregressive distributed lags (NARDL).	Pengangguran meningkatkan kemiskinan dalam jangka panjang.	<i>Heliyon</i> , 9(10), e20267. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20267
18.	Irawan, E. (2022), Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2021	Meneliti pengaruh pengangguran dan IPM terhadap tingkat Kemiskinan.	Jenis data yang diregresi adalah data <i>time series</i>	Tingkat pengangguran dan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	<i>International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)</i> , 6(2), 950. https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i2.5455
19.	Hasan, Z. (2021), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia.	Meneliti pengaruh IPM terhadap kemiskinan.	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah SPSS.	IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.	<i>Journal of Economics and Sustainability</i> , 3(No.1), 42–53. https://doi.org/10.32890/jes2021.3.1.5
20.	Ullah, A., Raza, K., Shahzad, M. A., & Nasir, M. F. (2023), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Perdagangan Terbuka, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan: Prospek	Meneliti pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan.	Model analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah <i>autoregressive distributed lag (ARDL)</i> .	Dalam jangka pendek, tingkat kemiskinan di Pakistan dipengaruhi oleh inflasi dan tingkat pengangguran.	<i>Russian Law Journal</i> , XI(4), 1123–1136.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Tantangan di Pakistan.				
21.	Dahliah. (2023), Pengaruh Modal Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Peran Moderasi Investasi, Sulawesi Selatan.	Menganalisis pengaruh pengangguran, terhadap kemiskinan.	Metode analisis menggunakan statistik deskriptif, asumsi klasik, analisis jalur, dan Sobel.	Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 16, 1.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk menyederhanakan fenomena yang diangkat serta keterkaitan antar variabel yang diteliti dalam tinjauan pustaka.

2.3.1 Hubungan IPM Terhadap Kemiskinan

Menurut M. Nasir (2008) salah satu yang menyebabkan tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia adalah faktor sumber daya manusia yang bisa diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini terlihat dari meningkatnya indeks pembangunan manusia juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang di perhatikan meningkatnya keterampilan seseorang sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Pada akhirnya pekerja yang memiliki produktivitas tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.

Produktivitas yang baik akan menyebabkan peningkatan pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tanggungannya. Oleh

karena itu, IPM berimplikasi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal tersebut didukung oleh beberapa studi empiris (Ali, Timun, & Murfain, 2022; Azriyansyah, 2022; Bondoyudho, Laut, Septiani, Ekonomi, & Tidar, 2020; Dwi Prasetyo & Arifin, 2022; Estrada & Wenagama, 2020; Praja, Muchtar, & Sihombing, 2023; Saputra & Harahap, 2022).

2.3.2 Hubungan TPT Terhadap Kemiskinan

Kebutuhan seseorang yang bermacam-macam membuat seseorang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta hal yang perlu dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Jika mereka tidak bekerja dan menganggur, maka konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri dan tanggungannya secara baik. Orang-orang yang menganggur tentunya tidak memiliki pendapatan dari pekerjaan atau hasil produksinya. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi ataupun pengeluaran pokoknya di bawah garis kemiskinan maka akan menyebabkan mereka masuk ke dalam kategori penduduk miskin yang memungkinkan akan meningkatkan angka kemiskinan.

Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai sehingga menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Sukirno, 2010). Tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan yang positif terhadap kemiskinan. Hal tersebut juga didukung dengan studi terdahulu yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan (Ali et al., 2022; Azriyansyah, 2022; Bintang & Woyanti, 2018;

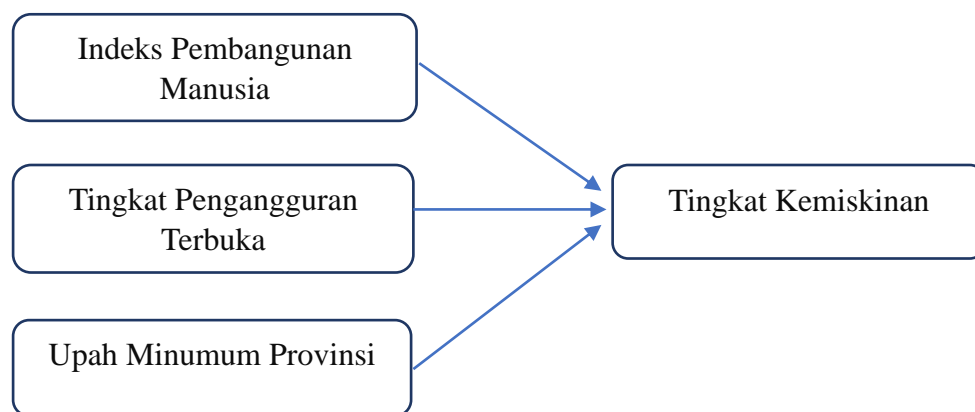
Bondoyudho et al., 2020; Dwi Prasetyo & Arifin, 2022; Estrada & Wenagama, 2020; Laga Priseptian, 2022; Mahsunah, 2013; Praja et al., 2023; Saputra & Harahap, 2022; Sari, 2021).

2.3.3 Hubungan UMP Terhadap Kemiskinan

Upah minimum memiliki pengaruh terhadap rendahnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu daerah sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya secara tidak langsung masyarakat akan mengalami kemiskinan. Dengan kata lain ketika upah minimum meningkat maka dapat meningkatkan pendapatan para pekerja sehingga membantu mereka keluar dari kemiskinan ketika mereka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Maka upah minimum dapat dijadikan sebagai cara untuk mengurangi angka kemiskinan. Hal tersebut juga didukung dengan studi terdahulu yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (Ali et al., 2022; Azriyansyah, 2022; Bintang & Woyanti, 2018; Bondoyudho et al., 2020; Dwi Prasetyo & Arifin, 2022; Estrada & Wenagama, 2020; Laga Priseptian, 2022; Mahsunah, 2013; Praja et al., 2023; Saputra & Harahap, 2022; Sari, 2021).

Namun UMP memungkinkan juga dapat meningkatkan kemiskinan. Hal tersebut mungkin terjadi apabila tingkat penawaran kerja melebihi tingkat permintaan tenaga kerja hal ini dapat berdampak pada pengangguran masyarakat lokal dan menimbulkan masalah kemiskinan. Pada penelitian sebelumnya terkait pengaruh UMP terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa

Tengah yang menunjukkan hasil pengaruh positif dan signifikan UMP terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dengan koefisiensi 5.174,27. Hasil penelitian ini menggambarkan setiap kenaikan upah Rp100.000 per bulan akan meningkatkan 5.174 jiwa penduduk miskin (Woyanti, 2018). Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ihsan & Ikhsan, 2018; Saputra & Harahap, 2022).



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara bersumber dari fenomena yang diangkat untuk diteliti lebih lanjut guna memverifikasi kebenarannya melalui metode analisis yang digunakan. Pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian memiliki kedudukan yang penting dalam hal pengambilan keputusan (Kim, 2020). Berdasarkan pada permasalahan, teori, dan kerangka pemikiran yang ada, maka penulis dapat menyusun hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial IPM dan UMP berpengaruh negatif, sedangkan TPT berpengaruh positif terhadap kemiskinan di lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia tahun 2010-2022.
2. Diduga secara bersama-sama IPM, TPT, dan UMP berpengaruh terhadap kemiskinan di lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia tahun 2010-2022.